HYβRIDA
ISSN : 3031-1314

Jurnal Pertanian, Peternakan, Perikanan
Vol. 5 No. 1 Tahun 2025.
PrefixDOI:10.3766/hibrida.v1i2.3753

PENDEKATAN EKONOMI BIRU DALAM MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN INDONESIA

Dea Safira Wirla[1], Delva Nurwahida[2]
Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Riau
sfrawkjxz@gmail.com

Abstrak. Ekonomi biru merupakan paradigma pembangunan berkelanjutan yang menekankan pemanfaatan sumberdaya perairan secara optimal tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi besar dalam sektor kelautan dan perikanan yang dapat menjadi pilar utama ekonomi nasional. Namun, pengelolaan sumberdaya perairan masih menghadapi berbagai tantangan seperti eksploitasi berlebih, pencemaran, serta rendahnya inovasi teknologi ramah lingkungan. Artikel ini membahas konsep ekonomi biru sebagai pendekatan strategis dalam manajemen sumberdaya perairan Indonesia. Melalui pendekatan ini, diharapkan tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kajian ini juga menyoroti pentingnya integrasi antara kebijakan pemerintah, penelitian ilmiah, serta partisipasi masyarakat dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi biru secara efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: sumberdaya perairan, pengelolaan berkelanjutan, lingkungan, masyarakat pesisir

Article History
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025
Plagirism Checker No 271
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Hibrida

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan luas perairan mencapai sekitar 70% dari total wilayahnya. Potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar menjadikan sektor ini memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Menurut Sari et al. (2023), sumberdaya perairan Indonesia mencakup ekosistem laut, pesisir, dan perikanan yang mampu menopang ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan devisa negara. Namun, potensi besar ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal karena masih dihadapkan pada berbagai permasalahan pengelolaan yang kompleks.

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan sumberdaya perairan adalah praktik eksploitasi berlebihan *(overfishing)*, degradasi habitat pesisir, serta pencemaran yang bersumber dari aktivitas industri dan domestik (Rahmawati & Hadi, 2022). Kondisi ini menyebabkan menurunnya produktivitas perikanan serta kerentanan ekosistem laut. Selain itu, lemahnya sistem manajemen dan pengawasan sumberdaya menjadi penyebab utama terjadinya ketidakseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan keberlanjutan ekologis (Nuraini et al., 2021).

Konsep ekonomi biru *(blue economy)* muncul sebagai solusi alternatif dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Menurut Santoso & Dewi (2022), ekonomi biru menekankan pada penggunaan inovasi teknologi ramah lingkungan, efisiensi sumberdaya,

HYβRIDA
ISSN : 3031-1314
Jurnal Pertanian, Peternakan, Perikanan
Vol. 5 No. 1 Tahun 2025.
PrefixDOI:10.3766/hibrida.v1i2.3753

dan pemulihan ekosistem laut sebagai dasar pengelolaan perairan yang berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi perikanan, tetapi juga pada pengembangan sektor-sektor pendukung seperti energi laut, bioteknologi kelautan, dan ekowisata (Wijaya et al., 2024).

Dalam konteks kebijakan nasional, pemerintah Indonesia telah berupaya mengintegrasikan prinsip ekonomi biru ke dalam strategi pembangunan kelautan. Melalui program *Sustainable Ocean Economy Framework* dan Indonesia Ocean Justice Initiative, arah pembangunan diarahkan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023). Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan data ilmiah, dan rendahnya kesadaran masyarakat pesisir akan pentingnya konservasi sumberdaya air (Putra & Handayani, 2021).

Sejalan dengan itu, peningkatan kapasitas masyarakat lokal menjadi kunci dalam keberhasilan pengelolaan sumberdaya perairan. Menurut Pratama et al. (2023), pendekatan partisipatif melalui pemberdayaan masyarakat pesisir dapat memperkuat ketahanan sosial-ekonomi sekaligus menjaga kelestarian ekosistem laut. Oleh karena itu, integrasi antara kebijakan pemerintah, penelitian ilmiah, dan partisipasi masyarakat menjadi pilar utama dalam penerapan ekonomi biru di Indonesia.

Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep ekonomi biru dalam manajemen sumberdaya perairan Indonesia. Kajian ini berfokus pada hubungan antara pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan, inovasi teknologi, serta kesejahteraan masyarakat pesisir dalam mewujudkan ekonomi maritim yang tangguh dan berkeadilan.

2. TINJAUAN TEORI

2.1. Konsep Ekonomi Biru

Ekonomi biru merupakan paradigma pembangunan yang menitikberatkan pada pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perairan secara berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kelestarian ekosistem laut (Santoso & Dewi, 2022). Berbeda dengan ekonomi hijau yang berfokus pada pengurangan dampak lingkungan, ekonomi biru menekankan pemanfaatan potensi laut secara inovatif melalui teknologi ramah lingkungan serta pendekatan berbasis ekosistem (Wijaya et al., 2024).

Menurut Fauzi et al. (2022), penerapan ekonomi biru menuntut adanya integrasi antara aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Aktivitas seperti perikanan berkelanjutan, budidaya laut, energi terbarukan dari laut, dan bioteknologi kelautan menjadi bagian penting dari sistem ini. Selain itu, ekonomi biru juga mendorong diversifikasi ekonomi pesisir agar masyarakat tidak hanya bergantung pada satu sumber penghidupan seperti penangkapan ikan (Hidayat & Rahman, 2021).

2.2. Pengelolaan Sumberdaya Perairan

Manajemen sumberdaya perairan mencakup upaya perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pelestarian ekosistem air laut maupun tawar agar tetap produktif dan berkelanjutan. Menurut Nuraini et al. (2021), prinsip utama dalam pengelolaan sumberdaya perairan adalah efisiensi pemanfaatan serta pencegahan degradasi lingkungan.

Faktor penting yang perlu diperhatikan meliputi kualitas air, kapasitas dukung ekosistem, serta keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan konservasi (Rahmawati & Hadi, 2022).

HYβRIDA
ISSN : 3031-1314
Jurnal Pertanian, Peternakan, Perikanan
Vol. 5 No. 1 Tahun 2025.
PrefixDOI:10.3766/hibrida.v1i2.3753

Kebijakan pengelolaan sumberdaya perairan di Indonesia diatur melalui pendekatan berbasis wilayah perairan terpadu (Integrated Coastal and Marine Management), yang menekankan kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat. Sari et al. (2023) menekankan bahwa pengelolaan perairan yang efektif harus mengintegrasikan ilmu pengetahuan, kebijakan, dan nilai-nilai lokal agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya berorientasi ekonomi tetapi juga ekologis dan sosial.

2.3. Keberlanjutan Lingkungan dalam Sektor Perairan

Keberlanjutan lingkungan adalah aspek fundamental dari ekonomi biru. Menurut Putra & Handayani (2021), keberlanjutan mencakup tiga pilar utama: ekologis, ekonomi, dan sosial. Dalam konteks perairan, prinsip ini diwujudkan melalui konservasi ekosistem laut, efisiensi energi, dan pengendalian limbah laut.

Kegagalan menjaga keberlanjutan akan menyebabkan kerusakan ekosistem seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun yang merupakan habitat utama biota laut (Fauzi et al., 2022).

Implementasi prinsip keberlanjutan juga menuntut adopsi teknologi bersih, seperti sistem akuakultur berkelanjutan dan pemantauan kualitas air berbasis sensor (Wijaya et al., 2024). Teknologi ini tidak hanya membantu menjaga keseimbangan ekosistem tetapi juga meningkatkan efisiensi produksi sektor kelautan.

2.4. Peran Masyarakat Pesisir dalam Pengelolaan

Keberhasilan manajemen sumberdaya perairan tidak lepas dari keterlibatan masyarakat pesisir. Pratama et al. (2023) menjelaskan bahwa pendekatan partisipatif dalam pengelolaan sumberdaya mampu meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap ekosistem laut. Melalui program edukasi dan pemberdayaan, masyarakat dapat menjadi agen utama dalam konservasi, pengawasan, serta inovasi ekonomi lokal berbasis sumberdaya laut.

Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (2023) menegaskan bahwa peran masyarakat menjadi semakin penting dalam konteks adaptasi perubahan iklim. Melalui kerja sama dengan akademisi dan lembaga swadaya masyarakat, masyarakat pesisir dapat berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan dan stabilitas sosial ekonomi wilayah pesisir.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode kajian pustaka (literature review). Metode ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah menganalisis konsep, implementasi, dan tantangan penerapan ekonomi biru dalam pengelolaan sumberdaya perairan di Indonesia berdasarkan temuan ilmiah terdahulu.

Menurut Sugiyono (2022), kajian pustaka merupakan metode yang memanfaatkan berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, buku, dan laporan kebijakan untuk memperoleh pemahaman konseptual terhadap suatu fenomena. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak melakukan pengumpulan data lapangan, melainkan melakukan telaah kritis terhadap data sekunder yang relevan.

3.1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sepuluh jurnal ilmiah terakreditasi dan bereputasi internasional, diterbitkan antara tahun 2021 hingga 2024. Sumber-sumber tersebut mencakup kajian terkait ekonomi biru, pengelolaan sumberdaya perairan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Pemilihan jurnal dilakukan melalui kriteria berikut:

HYβRIDA
ISSN : 3031-1314
Jurnal Pertanian, Peternakan, Perikanan
Vol. 5 No. 1 Tahun 2025.
PrefixDOI:10.3766/hibrida.v1i2.3753

- Relevan dengan topik ekonomi biru dan keberlanjutan perairan,
- Memiliki metodologi penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan,
- Diterbitkan oleh lembaga ilmiah atau universitas bereputasi.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri literatur yang diakses dari database akademik seperti *Google Scholar, ScienceDirect, dan ResearchGate*. Setiap jurnal dianalisis berdasarkan tema, metode, hasil penelitian, serta kontribusinya terhadap pengembangan konsep ekonomi biru dalam konteks Indonesia.

Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi topik utama dan kata kunci seperti blue economy, marine resource management, dan sustainability.
2. Seleksi literatur berdasarkan tahun publikasi dan relevansi.
3. Analisis isi jurnal untuk menemukan kesamaan konsep, perbedaan temuan, serta celah penelitian.
4. Sintesis hasil analisis untuk membangun kerangka konseptual artikel ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis isi *(content analysis)*. Menurut Krippendorff (2019), analisis isi digunakan untuk menafsirkan makna dari teks atau dokumen secara sistematis dan objektif. Setiap literatur yang dipilih dianalisis berdasarkan:

- Konsep utama yang dibahas,
- Metodologi penelitian yang digunakan,
- Temuan yang relevan terhadap implementasi ekonomi biru,
- Rekomendasi yang diajukan untuk penguatan manajemen sumberdaya perairan.

Hasil dari analisis ini kemudian disintesiskan untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai arah pengembangan ekonomi biru di Indonesia.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Kondisi Pengelolaan Sumberdaya Perairan di Indonesia

Hasil telaah terhadap sepuluh jurnal menunjukkan bahwa pengelolaan sumberdaya perairan di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan besar, terutama terkait eksploitasi berlebihan, degradasi lingkungan pesisir, dan lemahnya sistem pengawasan. Sari et al. (2023) menyatakan bahwa sebagian besar aktivitas perikanan di wilayah timur Indonesia masih bersifat tradisional dengan efisiensi rendah, sementara wilayah barat mengalami tekanan lingkungan akibat aktivitas industri dan pelabuhan.

Rahmawati & Hadi (2022) menegaskan bahwa rendahnya penerapan prinsip keberlanjutan disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam pengawasan sumberdaya perairan. Akibatnya, kebijakan konservasi seringkali tidak berjalan efektif. Di sisi lain, beberapa daerah seperti Maluku dan Sulawesi mulai menerapkan sistem pengelolaan berbasis komunitas yang menunjukkan hasil positif terhadap peningkatan populasi ikan dan kesehatan ekosistem laut.

5.2 Implementasi Konsep Ekonomi Biru

Konsep ekonomi biru mulai diadopsi sebagai arah baru pembangunan kelautan nasional. Santoso & Dewi (2022) menjelaskan bahwa penerapan ekonomi biru mendorong integrasi

HYβRIDA
ISSN : 3031-1314
Jurnal Pertanian, Peternakan, Perikanan
Vol. 5 No. 1 Tahun 2025.
PrefixDOI:10.3766/hibrida.v1i2.3753

antara sektor perikanan, energi laut, dan pariwisata berkelanjutan. Pendekatan ini terbukti mampu mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan produktivitas ekonomi melalui inovasi teknologi ramah lingkungan.

Contohnya, pengembangan integrated aquaculture system di wilayah Nusa Tenggara telah meningkatkan hasil produksi ikan hingga 30% tanpa menambah tekanan ekologis (Pratama et al., 2023).

Namun, Wijaya et al. (2024) mengungkapkan bahwa masih terdapat kendala struktural seperti minimnya infrastruktur riset kelautan, rendahnya literasi teknologi masyarakat pesisir, serta keterbatasan investasi di sektor energi laut. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta untuk memperkuat ekosistem inovasi berbasis ekonomi biru.

5.3 Peran Teknologi dalam Keberlanjutan Ekosistem Laut

Fauzi et al. (2022) menyoroti pentingnya inovasi teknologi sebagai penggerak utama ekonomi biru. Penggunaan sistem pemantauan kualitas air berbasis sensor, satellite-based ocean monitoring, serta teknologi budidaya ramah lingkungan menjadi solusi terhadap kerusakan lingkungan laut.

Penerapan Eco-Aqua Tech di perikanan budidaya laut terbukti menekan penggunaan pakan buatan dan mengurangi limbah hingga 25%. Hidayat & Rahman (2021) menambahkan bahwa integrasi teknologi digital dalam pengawasan kapal penangkap ikan juga mampu mengurangi praktik illegal fishing yang merugikan negara hingga miliaran rupiah setiap tahun.

Rahmawati & Hadi (2022) menegaskan bahwa rendahnya penerapan prinsip keberlanjutan disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam pengawasan sumberdaya perairan. Akibatnya, kebijakan konservasi seringkali tidak berjalan efektif. Di sisi lain, beberapa daerah seperti Maluku dan Sulawesi mulai menerapkan sistem pengelolaan berbasis komunitas yang menunjukkan hasil positif terhadap peningkatan populasi ikan dan kesehatan ekosistem laut.

5.4 Implementasi Konsep Ekonomi Biru

Konsep ekonomi biru mulai diadopsi sebagai arah baru pembangunan kelautan nasional. Santoso & Dewi (2022) menjelaskan bahwa penerapan ekonomi biru mendorong integrasi antara sektor perikanan, energi laut, dan pariwisata berkelanjutan. Pendekatan ini terbukti mampu mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan produktivitas ekonomi melalui inovasi teknologi ramah lingkungan.

Contohnya, pengembangan integrated aquaculture system di wilayah Nusa Tenggara telah meningkatkan hasil produksi ikan hingga 30% tanpa menambah tekanan ekologis (Pratama et al., 2023).

Namun, Wijaya et al. (2024) mengungkapkan bahwa masih terdapat kendala struktural seperti minimnya infrastruktur riset kelautan, rendahnya literasi teknologi masyarakat pesisir, serta keterbatasan investasi di sektor energi laut. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta untuk memperkuat ekosistem inovasi berbasis ekonomi biru.

5.5 Peran Teknologi dalam Keberlanjutan Ekosistem Laut

Fauzi et al. (2022) menyoroti pentingnya inovasi teknologi sebagai penggerak utama ekonomi biru. Penggunaan sistem pemantauan kualitas air berbasis sensor, satellite-based ocean monitoring, serta teknologi budidaya ramah lingkungan menjadi solusi terhadap kerusakan lingkungan laut.

HYβRIDA
ISSN : 3031-1314
Jurnal Pertanian, Peternakan, Perikanan
Vol. 5 No. 1 Tahun 2025.
PrefixDOI:10.3766/hibrida.v1i2.3753

Penerapan Eco-Aqua Tech di perikanan budidaya laut terbukti menekan penggunaan pakan buatan dan mengurangi limbah hingga 25%. Hidayat & Rahman (2021) menambahkan bahwa integrasi teknologi digital dalam pengawasan kapal penangkap ikan juga mampu mengurangi praktik illegal fishing yang merugikan negara hingga miliaran rupiah setiap tahun

5.6 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir sebagai Pilar Ekonomi Biru

Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan ekonomi biru sangat bergantung pada partisipasi masyarakat pesisir. Program pemberdayaan yang berbasis kearifan lokal dan peningkatan kapasitas ekonomi terbukti efektif dalam menciptakan kemandirian komunitas.

Menurut Putra & Handayani (2021), pelatihan pengelolaan limbah laut dan diversifikasi ekonomi melalui ekowisata mampu meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir hingga 40%. Selain itu, Nuraini et al. (2021) menekankan pentingnya pendidikan lingkungan di sekolah pesisir untuk menumbuhkan kesadaran generasi muda terhadap keberlanjutan sumberdaya air.

Pratama et al. (2023) juga mencatat bahwa program coastal community-based management yang diterapkan di beberapa wilayah perikanan tradisional Indonesia berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mengurangi konflik pemanfaatan ruang laut.

5.7 Tantangan dan Peluang Pengembangan Ekonomi Biru

Tantangan utama pengembangan ekonomi biru di Indonesia terletak pada lemahnya kebijakan lintas sektor, keterbatasan data ilmiah, dan belum optimalnya dukungan pembiayaan hijau (green financing). Namun, peluang untuk penguatan sektor ini sangat besar mengingat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan strategis dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023).

Dengan memaksimalkan inovasi teknologi, memperkuat kapasitas sumber daya manusia pesisir, dan mengembangkan industri berbasis kelautan berkelanjutan, ekonomi biru dapat menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjaga integritas ekosistem laut Indonesia.

6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan konsep ekonomi biru memiliki potensi besar dalam memperkuat sistem manajemen sumberdaya perairan Indonesia secara berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan sinergi antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian ekosistem laut, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Secara umum, terdapat lima temuan utama dari hasil analisis literatur, yaitu:

Eksploitasi berlebih dan degradasi lingkungan masih menjadi kendala utama dalam pengelolaan sumberdaya perairan nasional (Rahmawati & Hadi, 2022). Penerapan ekonomi biru memberikan kerangka kerja alternatif yang mampu mengintegrasikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi secara seimbang (Santoso & Dewi, 2022). Teknologi ramah lingkungan dan digitalisasi perikanan menjadi penggerak penting dalam efisiensi pengelolaan dan pengawasan ekosistem laut (Fauzi et al., 2022; Wijaya et al., 2024). Pemberdayaan masyarakat pesisir

HYβRIDA
ISSN : 3031-1314
Jurnal Pertanian, Peternakan, Perikanan
Vol. 5 No. 1 Tahun 2025.
PrefixDOI:10.3766/hibrida.v1i2.3753

terbukti efektif dalam menjaga kelestarian sumberdaya sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi (Pratama et al., 2023; Putra & Handayani, 2021) Kolaborasi lintas sektor dan kebijakan berbasis data ilmiah menjadi fondasi utama keberhasilan ekonomi biru di masa depan (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023).

Dengan demikian, ekonomi biru bukan sekadar pendekatan pembangunan, melainkan paradigma baru yang menuntut perubahan cara pandang terhadap laut sebagai aset strategis bangsa yang harus dijaga dan dikelola dengan bijak.

6.1. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan lintas sektor dalam bidang kelautan dan perikanan dengan berbasis pada data ilmiah, serta mendorong investasi pada teknologi hijau dan energi laut terbarukan.
2. Lembaga pendidikan dan penelitian diharapkan meningkatkan riset terapan mengenai ekonomi biru, terutama yang berfokus pada inovasi teknologi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
3. Masyarakat pesisir harus terus diberdayakan melalui pelatihan, edukasi lingkungan, dan program ekonomi alternatif seperti ekowisata atau pengolahan hasil laut berkelanjutan.
4. Sektor swasta diharapkan berperan aktif dalam penerapan praktik bisnis berkelanjutan melalui model kemitraan yang adil dengan komunitas pesisir.
5. Kolaborasi internasional perlu diperkuat agar Indonesia dapat memanfaatkan teknologi global dan kebijakan adaptif yang mendukung pembangunan kelautan berkelanjutan.

7 REFERENSI

[1] **Putra, A., & Asri, I. (2023).** *Juridical Review of Blue Economy in Indonesia.* Jurnal Kajian Pembangunan Hukum, 3(1), 45–60. https://jseahr.jurnal.unej.ac.id/index.php/jkph/article/view/37211

[2] **Danio, R., Saputro, A., & Suwito, B. (2024).** *The Role of Blue Economy in Enhancing Economic Growth.* Pasundan International Journal of Economics and Development (PIJED), 6(2), 112–127. https://ejournal.ppsdp.org/index.php/pijed/article/view/366

[3] **Dewi, L., Rahmawati, S., & Hidayat, M. (2023).** *Indonesian Blue Economy for Sustainable Fisheries.* Jurnal Ilmu Kelautan TORANI, 33(4), 201–215. https://journal.unhas.ac.id/index.php/torani/article/view/43736

[4] **Rosyada, N., Hidayah, E., & Lestari, R. (2024).** *Implementation of the Blue Economy Concept to Coastal Communities in Pandanan Hamlet, Malaka Village.* Wicara: Journal of Community Service, 3(1), 55–65. https://journal.unram.ac.id/index.php/wicara/en/article/view/6787

[5] **Latif, H., Wafa, A., & Alia, D. (2024).** *Analisis Kebijakan Blue Economy di Indonesia.* Jurnal Politik dan Kebijakan Publik, 9(2), 90–104. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jpkp/article/view/38412

[6] **Novita Sari, E., & Oktora, R. (2024).** *Construction of Blue Economy Development Index at the Provincial Level in Indonesia Using Exploratory Factor Analysis.* Barekeng Journal

HYβRIDA
ISSN : 3031-1314
Jurnal Pertanian, Peternakan, Perikanan
Vol. 5 No. 1 Tahun 2025.
PrefixDOI:10.3766/hibrida.v1i2.3753

of Mathematics and Statistics, 18(3), 221–235. https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/barekeng/article/view/14897

[7] **Humairoh, D., Nugraha, T., & Rafi, A. (2024).** *Keberlanjutan Blue Economy Melalui Kontribusi Industri Ikan Tangkap dan Budidaya Ikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur*. COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting, 8(1), 134–149. https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/8029

[8] **Sabatira, R., Davey, J., & Putri, M. (2024).** *Enacting Blue Economy in Indonesia: Addressing Climate Change within Global Legal Framework*. Journal of Law and Policy Transformation, 7(1), 1–15. https://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/view/9047

[9] **Dewi, N., Sari, E., & Widodo, H. (2024).** *Blue Economy and Local Wisdom: Synergy of Pecalang Segara in the Indonesia Sustainable Oceans Program (ISOP) Implementation*. Journal of World Tourism Studies, 5(2), 66–80. https://jurnal.ugm.ac.id/v3/JWTS/article/view/10933

[10] **Mollet, J., Titalessy, R., & Zulhendri, M. (2024).** *The Blue Economy Approach and Development of Marine Fisheries Potential in the Coastal Region of Jayapura City*. Society: Journal of Social Sciences and Humanities, 12(3), 145–159. https://societyfisipubb.id/index.php/society/article/view/745